

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pemerintahan daerah di Indonesia pada tahun 2001 memasuki zaman baru otonomi daerah telah diberlakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah revisi ulang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Karin (2015) menyatakan bahwa kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah otonomi daerah. Otonomi daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah tetapi juga dengan disertai pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri.

Desentralisasi fiskal, di sisi lain, memang memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah masing – masing dan memanfaatkan sumber daya tersebut, hal itu akan terealisasi ketika infrastruktur yang menjadi sumber pendanaan daerah yang sekaligus menunjang perekonomian masyarakat juga tersedia dengan merata antara daerah satu dengan yang lain, namun kenyataan dilapangan tidaklah sejalan dengan harapan yang diinginkan, kekuatan infrastruktur penunjang perekonomian daerah tidak tersebar merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Desentralisasi fiskal saat ini, diharapkan dapat memberikan perbaikan kualitas pelayanan pada semua sektor

publik, yang paling utama di sektor publik dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap sektor publik dapat memberikan daya tarik kepada investor untuk menarik investasi di daerah (Ni putu, 2014).

Bertambahnya investasi modal diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2002). Transfer dana dari pusat diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan alam yang ada pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ahmad Yani, 2008:61). Menurut Darwanto dan Yulia (2007), Kusnandar dan Dodik (2011), Pungky (2011) menyatakan bahwa PAD mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pemerintah Pusat juga mengeluarkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU). Dana alokasi umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi. Disahkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dimana daerah diberikan otonomi

atau kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tak terkecuali didalam mengatur masalah *financial* (Paujiah, 2012).

Perbedaan kemampuan keuangan pada setiap daerah dalam hal rangka pembelanjaan, pemerintahan daerah berupaya melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk belanja kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi (Ni Putu, 2014). Sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya disebut dengan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dino Riann (2014) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memperoleh hasil dimana terdapat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Kondisi ini dikarenakan dana alokasi umum yang diterima oleh daerah hanya untuk membiayai pengeluaran rutin saja, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Pengalokasian belanja modal pemerintah sebagian berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah yang terus meningkat sehingga mampu berkontribusi pada pelayanan sektor publik yang baik. Tujuan belanja modal adalah membangun aset

tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur dengan menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas perekonomian daerah. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkatkan belanja modal.

Perkembangan ekonomi diukur dari suatu kegiatan pembangunan daerah, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan pada sektor perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kondisi kegiatan perekonomian yang mengakibatkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya perkembangan ekonomi yang meningkat setiap tahun. Tekanannya pada tiga aspek yaitu: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Bataineh (2012) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk kemiskinan pedesaan dan pertumbuhan produktivitas di India menunjukkan hasil bahwa untuk mengurangi kemiskinan daerah pedesaan, maka pemerintah harus dapat mengutamakan investasi seperti perbaikan akses jalan pedesaan, sektor pertanian dan pelayanan publik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi agar terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang merata.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah

sebagai katalisator dan fasilitator. Melalui anggaran belanja, pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Namun ada pula pengeluaran pemerintah yang banyak mengurangi pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya kegiatan yang dilakukan kurang efisien, mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan beban pada sistem ekonomi (Ram, 1986).

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan perkembangan yang ada di Provinsi Jawa Timur alokasi proporsi belanja modal lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang. Padahal dari belanja modal itu sendiri dapat mendatangkan manfaat yang lebih tinggi dalam hal peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, pelaksanaan pemerintah daerah dalam menyusun APBD lebih banyak mengalokasikan pada anggaran sektor belanja operasi dari pada belanja modal. Pengeluaran pemerintah terhadap belanja modal daerah yang sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi antara dana alokasi umum terhadap belanja modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memberikan bukti empiris pada:

1. Menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
2. Menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.
3. Menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
4. Menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi antara dana alokasi umum dengan belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dapat digunakan untuk instansi pemerintah
 1. Untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian belanja modal.
 2. Pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Bagi STIE PERBANAS Surabaya
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang serupa.
 2. Dapat digunakan sebagai gambaran umum oleh pembaca untuk dapat mengulas masalah pajak dan belanja modal dengan objek penelitian sama.
 3. Untuk melengkapi penelitian telah dilakukan penelitian yang serupa terdahulu dan dengan variabel membuktikan apakah yang lebih spesifik akan tetap hasil yang sama atau sebaliknya hasil berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Manfaat Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga berisi landasan teori yang berkaitan dengan persistensi laba yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik dan uji regresi linear berganda, serta pembahasan yang mengarah pada perumusan masalah dan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab mengenai Hipotesis Penelitian, Keterbatasan Penelitian serta saran yang diharapkan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

